

# SEJARAH PERJUANGAN BANGSA SEBAGAI MODALITAS MEMPERKUAT PERTAHANAN NEGARA

## HISTORY OF NATION STRUGGLE AS MODALITY FOR STRENGTHENING STATE DEFENSE

Susanto Zuhdi<sup>1</sup>

Universitas Indonesia  
(Email : susanto.zuhdi@idu.ac.id)

**Abstrak** – Dalam perspektif historis, setiap zaman melahirkan semangatnya sendiri. Di era abad ke-21, pergeseran kekuatan dunia begitu cepat, yang pada dasarnya tidak lain karena masing-masing kekuatan hendak menguasai sumber daya bagi keberlanjutan kehidupannya. Sebagian besar sumber daya itu berada di Tanah Air kita. Dimana letak kekuatan kita adalah pertanyaan yang memerlukan doktrin pertahanan beserta penjabarannya yang mampu menjawab terhadap kompleksitas ancaman baik dari luar dan dalam negeri. Dalam perspektif geo-historis dan pendekatan sejarah politik, maka potensi kekuatan bangsa ada pada nilai-nilai cinta tanah air dan kebangsaan, yang dapat disebut sebagai simpul-simpul perekat keindonesiaan.

**Kata Kunci:** sejarah, perjuangan bangsa, modalitas, pertahanan negara

**Abstract** – In historical perspective, every era has given its own spirit. In the 21st century, world power movement happened so fast due to each power want to dominate resources for their life continuity. In this regard, most of the resources are available in our country. Where is the position of our strength is the question that need to be answered from defensive doctrine with the implementation that could answer the complexity of threat from inside and outside the country. In geo-historical perspective and political history approach, the potential of nation power relies on the value of loving the country and nationality that can be called as “gluten knot” of the indonesianess.

**Keywords:** history, nation struggle, modality, state defense

### Pendahuluan

Sudah menjadi prinsip bahwa setiap negara tidak akan mau mengkompromikan kepada pihak manapun mengenai hal-hal yang menyangkut kedaulatannya. Kedaulatan sebuah negara tercermin di dalam kemampuannya menjaga batas-batas wilayah teritorialnya dan keselamatan bangsanya. Di dalam cakupan wilayah kedaulatannya itulah suatu

---

<sup>1</sup>Guru Besar Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia; Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan).

kepentingan nasional sebuah negara akan dipertaruhkan dengan segenap daya kemampuan untuk mempertahankannya. Oleh karena itu untuk mempertaruhkan kepentingan nasionalnya, suatu negara akan mempertahankan dirinya dari segala ancaman baik datang dari luar dan dalam negeri.

Agaknya ingatan kita perlu disegarkan oleh sejarah bangsa ketika para *the founding fathers* mendiskusikan untuk tujuan apa dan dengan dasar apa sebuah negara bernama Indonesia dibentuk. Pertanyaan pendek namun memerlukan jawaban panjang yang argumentatif adalah ketika dr. Rajiman Wediodiningrat bertanya kepada anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada bulan Maret 1945: "apakah dasar bagi negara merdeka kelak?". Ir. Soekarno memberi jawaban atas pertanyaan itu yang kemudian dikenal sebagai "Lahirnya Pancasila" pada 1 Juni 1945.

Di dalam konteks pembahasan tentang negara yang akan didirikan (kelak) itulah *para the founding fathers* berolah pikir dan berargumentasi mengenai bagaimana menetapkan dan menjaga sebuah wilayah kedaulatan Republik Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta mengenai batas-batas wilayah. Pada sidang 10 Juli 1945, K.H. Abdul Kahar Muzakir angkat bicara tentang pentingnya "menetapkan halaman rumah, kemudian memagari, menjaga halaman rumahnya". Yang dimaksud 'rumah' adalah "negara" yang bukan saja harus dibuatkan 'pagar-pagar'nya melainkan juga menjaga dan mempertahankannya.<sup>2</sup>

Sedangkan Muhammad Yamin menegaskan perwujudan wilayah negara Indonesia yang merdeka adalah Tanah Air. Pada sidang 13 Mei 1945, dalam pembahasan mengenai "daerah negara dan kebangsaan Indonesia", Yamin menegaskan bahwa "pemahaman Tanah Air adalah konsep tunggal. Pendapat Yamin bahwa "membicarakan daerah negara Indonesia dengan menumpahkan perhatian kepada pulau dan daratan, sesungguhnya adalah berlawanan dengan keadaan sebenarnya"

Lebih lanjut Muhamad Yamin mengemukakan:

*" Tanah air Indonesia ialah terutama daerah lautan dan mempunyai pantai yang panjang. Bagi tanah yang terbagi atas beribu-ribu pulau, maka semboyan "mare liberum" (laut*

---

<sup>2</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995), hlm.153.

merdeka) menurut ajaran Hugo Grotius tidak dapat dilaksanakan begitu saja [...] maka akan sangat merendahkan kedaulatan negara dan merugikan kedudukan pelayar, perdagangan laut dan melemahkan pembelaan negara. Oleh sebab itu, maka dengan penentuan batasan daratan, haruslah pula ditentukan daerah air lautan manakah yang masuk menjadi daerah kita dan air laut manakah yang masuk lautan lepas”.<sup>3</sup>

Tampaklah bahwa Yamin sangat menyadari mengenai strategisnya posisi Indonesia dan oleh sebab itu tetap memberi ruang laut untuk kepentingan internasional, sebagaimana ia mengemukakan:

*“tidak menimbulkan kerugian, jikalau bagian Samudera Hindia, Samudera Pasifik dan Tiongkok Selatan diakui menjadi lautan bebas, tempat aturan “lautan bebas” (mare liberum) berlaku. Sekeliling pantai pulau yang jaraknya beberapa km, sejak dari garis air pasang-surut, dan segala selat yang jaraknya kurang daripada 12 km antara kedua garis pasang-surut, boleh ditutup untuk segala pelayaran di bawah bendera negara luaran selainnya dengan izin atau atas perjanjian dengan negara kita. Selat Sunda, Malaka, dan Makassar dibuka bagi segala kapal. Tentukanlah kini daerah daratan dan daerah lautan yang menjadi batas daerah Negara Persatuan Indonesia. Daerah ini mempunyai kedaulatan yang penuh tempat berkibarnya bendera kebangsaan kita”.*<sup>4</sup>

Adapun tujuan negara Indonesia sebagaimana tertuang di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Sebagai pengertian dari tujuan pada ungkapan melindungi bangsa dan wilayah negara adalah berupa cakupan upaya untuk menjaga kedaulatan negara. Fungsi utama pertahanan negara adalah menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa terhadap ancaman baik yang datang dari luar dan dalam negeri. Sebagai konsekuensinya, kita perlu mengidentifikasi sumber, sifat dan bentuk ancaman dengan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm., 75.

<sup>4</sup> *Ibid.*

memperhatikan kondisi geostrategi sebagai dasar untuk merumuskan sistem dan penyelenggaraan pertahanan yang didukung oleh dua komponen militer dan nirmiliter. Sinergitas kedua komponen tersebut menjadikan Indonesia berkemampuan merespon perubahan pesat lingkungan global yang membelitnya. Sun Tzu mengajarkan untuk mengenali siapa dirimu sama pentingnya dengan mengenali siapa musuhmu.

Tulisan ini hendak menjelaskan mengenai “siapa diri kita” dan dengan potensi kekuatan yang dimiliki sejauhmana kita mampu merespon lingkungan dunia yang berubah cepat. Tawaran kerangka yang digunakan adalah dengan pendekatan aspek geografi dan sejarah perjuangan bangsa. Aspek geografi merupakan *conditio sine quanon* bagi suatu penyusunan sistem dan penyelenggaraan pertahanan negara, sebagaimana diungkapkan dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan negara, pasal 3 ayat 2 “ Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan”.

Sedangkan aspek sejarah yang dimaksud adalah sebagai modal bangsa yang berisi pengalaman perjuangan pergerakan dan perang kemerdekaan serta dalam mengisi kemerdekaan itu, yang sarat dengan nilai-nilai yang menjadi orientasi bagi perjuangan untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Lebih mendalam, tulisan ini hendak mengangkat simpul-simpul kekuatan bangsa Indonesia dengan perspektif sejarah politik, yakni perjalanan bangsa dalam upaya merebut dan mempertahankan kemerdekaannya, dengan perjuangan panjang dan berat.

Di dalam proses panjang itu, muncul nilai-nilai sejarah yang terstruktur secara sosiologis yang menggerakkan aksi kolektif bangsa seperti terlihat dalam manifestasi nilai-nilai persatuan, cinta tanah air, kepahlawanan, solidaritas, dan pantang menyerah. Nilai-nilai tersebut terbukti telah menjadi fakta khususnya dalam masa revolusi dan perang kemerdekaan (1945-1949). Pengalaman historis seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi modal dasar untuk menumbuhkembangkan sikap Bela Negara.

### **Ancaman yang Semakin Kompleks**

Dalam konteks lingkungan dunia yang berubah pesat maka masalah besar yang dihadapi Indonesia adalah mengenai sejauhmana kesiapannya sebagai negara-bangsa, dengan

kondisi geografis berupa kepulauan dan dengan karakteristik penduduk yang beragam dalam artian etnisitas dan kebudayaannya, untuk mampu merespon berbagai ancaman baik dalam kaitan dengan sumber, dimensi, bentuk, sifat, skala, spektrum yang semakin kompleks.

Ancaman aktual dalam dekade ini dan ke depan terhadap kedaulatan wilayah Indonesia baik langsung atau tidak langsung bersumber, pertama, adalah ketegangan di Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara yang mengaku Kepulauan Spratley menjadi miliknya. Intensitas ketegangan di Laut Cina Selatan karena pada dasawarsa tahun 1970-an, ditemukan kandungan minyak bumi (*crude oil*) di Kepulauan Spratley.<sup>5</sup> Adapun negara-negara tersebut (*claimant states*) adalah Cina, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Konflik tersebut semakin meruncing ketika Cina menunjukkan kemajuannya di bidang militer dan tidak segan-segan lagi melancarkan provokasi. Kedua, berupa kehadiran kekuatan militer Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik. Ketiga, berupa ancaman non-tradisional yang merupakan implikasi kejahatan transnasional terhadap kepentingan pertahanan negara.

Meningkatnya kekuatan ekonomi dan militer Cina di kawasan Asia Pasifik mendorong Amerika Serikat semakin memperkuat kehadirannya di kawasan ini. Diawali dengan penempatan 500 personel marinir di Darwin untuk suatu rencana pengisian jumlah yang lebih banyak lagi, telah menunjukkan tujuan AS untuk membendung Cina. Berada di tengah dua kekuatan tersebut menjadikan tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk meresponnya secara cerdas. Sebagai negara yang tidak menjadi sekutu Amerika, seperti Thailand, Filipina, dan Singapura, yang memiliki keistimewaan, bagi Indonesia justru dapat berpotensi sebagai penghambat atau mengancam pertahanan negara.<sup>6</sup>

Jika ketegangan di Laut Cina Selatan berimplikasi terhadap kepentingan Indonesia di perbatasan wilayah kepulauan Natuna, kehadiran Amerika Serikat berimplikasi pada tuntutan terhadap pembukaan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Timur-Barat. Tuntutan atas pembukaan ALKI tersebut juga datang dari Inggris dan Australia. Motivasi Amerika adalah agar tujuan menghadapi Cina akan dipermudah manuver militernya jika

---

<sup>5</sup> Ditjend Strahan Kemhan, *Kebijakan Cina Terhadap Konflik Laut Cina Selatan*, (Jakarta: Kemhan, 2011), hlm.3.

<sup>6</sup> Ditjend Strahan Kemhan, *Kehadiran Militer Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik: Implikasi Bagi Pertahanan Negara Indonesia*, (Jakarta: Kemhan, 2011, hlm.5).

gerak dari Darwin dapat langsung memasuki perairan dalam Indonesia dari sebelah timur terus ke Laut Jawa dan selanjutnya Selat Karimata. Keduanya merupakan potensi ancaman terhadap kedaulatan NKRI.

Ketiga ALKI yang sudah disediakan bagi kepentingan pelayaran internasional itu saja belum dapat dikawal dan diawasi sebagai pen jagaan atas wilayah maritim dan udara, apalagi dengan ALKI keempat yang dituntut tersebut. Dengan meningkatnya intensitas ancaman keamanan asimetris dalam bentuk ancaman lintas negara, seperti perompakan, penyelundupan dan bahan peledak, penyelundupan perempuan dan anak-anak, imigran gelap, pembalakan liar, dan pencurian ikan, pembukaan ALKI Barat-Timur akan merupakan langkah sangat rawan bagi Indonesia.<sup>7</sup>

Meskipun tampaknya belum dianggap menjadi ancaman sekarang ini, Samudera Hindia akan menjadi wilayah laut yang mengundang berbagai kepentingan dari negara-negara yang memiliki armada laut yang kuat. Dalam doktrin maritimnya, Australia dengan jelas memperlihatkan kepentingannya terhadap Samudera Hindia. Sementara itu India pun dengan landasan kebijakan India memandang ke timur (*India's Look Policy*) yang dicanangkan tahun 1990-an di bawah kepemimpinan perdana menteri P.V. Narasimha Rao, mempunyai kepentingan besar terhadap samudera itu. Asia yang sedang menjadi pusat perhatian kekuatan dunia tidak mungkin lepas dari peranan samudera Hindia.<sup>8</sup>

Dalam perkembangan belakangan ini, kejahatan transnasional menjadi bentuk ancaman yang semakin mengkhawatirkan. Dengan didorong oleh globalisasi dan interdependensi antar kawasan membuat batas-batas wilayah teritorial antarnegara semakin kabur.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ditjend Strahan Kemhan, *Implikasi Dibukanya ALKI Barat-Timur dari Perspektif Pertahanan*, (Jakarta: Kemhan, 2011), hlm. 2-3.

<sup>8</sup> P.S. Das, "India's Maritime Security Concerns and Responses" dalam K.V. Kesavan & Daljit Singh (eds.), *South and Southeast Asia Responding to Changing Geo-Political and Security Challenges*, (New Delhi: Knowledge World Publishers Pvt Ltd, 2010), hlm.:48.

<sup>9</sup> Ditjend Strahan Kemhan, *Analisa Ancaman Non-Tradisional: Implikasi Kejahatan Transnasional terhadap Kepentingan Pertahanan Negara*, (Jakarta: Kemhan, 2011 ), hlm. 59.

## **Perspektif Geo-Historis**

Dari mata pelajaran geografi sejak di sekolah dasar, anak-anak Indonesia sudah dengan cepat menghafal dan dapat menyebutkan bahwa negaranya berada “di antara dua benua—Asia dan Australia dan di antara dua samudera—Hindia dan Pasifik”. Pengetahuan dasar ini penting artinya yang dapat dikembangkan sebagai modal membentuk kesadaran anak bangsa untuk merespon tantangan maupun ancaman terhadap kepentingan nasional. Dalam konteks ini, perlu ditumbuhkembangkan sikap anak bangsa sebagai konsekuensi dari posisi tersebut dalam merespon perkembangan dunia yang mengelilinginya. Selain itu, perlunya memahami pengalaman masa lampau dari penduduk di kepulauan Nusantara dalam proses menjadi bangsa Indonesia. Ada dua maksud yang penting diperhatikan bersama yakni kesadaran kolektif akan pentingnya lingkungan geografis dan tentang rasa kebangsaan atau nasionalisme.

Dalam posisi seperti itu maka letak Indonesia, memiliki nilai strategis yang melibatkan banyak kepentingan bangsa dan negara sejak berabad yang lampau. Terutama di bagian barat kepulauan Nusantara, sudah sejak awal milenia pertama sudah merupakan bagian dan berperan penting dalam kebaharian dunia. Selat Malaka telah lama memainkan peranan penting dalam jalur pelayaran Cina dan India yang kemudian diteruskan ke Persia, jazirah Arab dan ke negeri-negeri Timur Tengah lainnya.

Oleh karena letak dan karakteristik kemaritiman lah yang sesungguhnya membawa negeri kepulauan ini masuk ke dalam jaringan pelayaran dunia. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya adalah bahwa Indonesia merupakan wilayah yang terbuka atau bahkan sangat terbuka bagi masuknya dan berkembangnya unsur-unsur dari luar yang membentuk peradaban baru. Di dalam perkembangan ini, lahir suatu kehidupan masyarakat yang pluralistik dan merupakan mozaik indah sekaligus faktor kekuatan yang mengintegrasikan unsur-unsur yang beragam itu ke dalam suatu kesatuan yang solid. Menurut sejarawan maritim Adrian B. Lopian, telah berabad-abad lamanya kerajaan-kerajaan kecil yang terpecah letaknya di pulau-pulau Indonesia secara ekonomis, kultural dan juga sewaktu-waktu secara politis telah bergabung atau digabungkan dalam satuan-

satuan yang lebih besar.<sup>10</sup> Namun di sisi lain, tampak pula adanya faktor disintegratif oleh karena persaingan politik antarkerajaan Nusantara maupun yang disebabkan oleh kepentingan bangsa asing khususnya Eropa, yang semula bercorak dagang tetapi kemudian berkepentingan memaksakan kolonialisme yang eksploitatif.

Aktivitas berbagai kekuatan dagang dan kekuasaan Eropa sejak masa itu memperlihatkan besarnya kepentingan mereka atas sumber daya alam yang sangat melimpah di negeri ini. Perspektif historis memperlihatkan munculnya kekuatan-kekuatan bangsa asing dan kekuatan pribumi dalam perebutan samudera menuju ke kepulauan rempah di Kepulauan Maluku. Selama kurang lebih dua abad (1600-1800) dapat disaksikan wilayah Nusantara sudah menjadi *terra belica*, suatu wilayah peperangan. Kontestasi dapat terjadi antara sesama kerajaan Nusantara, antara kerajaan Nusantara dengan penakluk atau di antara sesama penakluk itu sendiri.

Sebagai wilayah peperangan, Nusantara menjadi perebutan di abad ke-19. Sebagai akibat dari perang Napoleon di Eropa dengan didudukinya negeri Belanda, ditempatkanlah Gubernur Jenderal Daendels. Dia lah yang membangun jaringan jalan besar pos (*de groote postweg*) terutama untuk tujuan memudahkan mobilisasi pasukan untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris.

Perubahan-perubahan cepat terjadi dalam sejarah dunia ketika terjadi peristiwa pecahnya Perang Dunia Kedua. Sejarah Indonesia menyaksikan kembali menjadi bagian dari *terra belica* bagi kontestasi antara Tentara Jepang vs Amerika Serikat dan sekutunya, dalam Perang Asia Timur Raya (1942-1945).

Sejak masa itu, maka tampak dengan tempo lebih cepat terjadi perubahan geopolitik di Asia Tenggara. Secara historis Indonesia sendiri lahir sebagai sebuah negara-bangsa yang merdeka justru dari perubahan dunia yang pesat itu. Bahkan di awal kemerdekaan yang baru dicapai itu, Indonesia berada di dalam pusaran konflik yang terus menerus terjadi antara kekuatan adidaya Uni Soviet dan Amerika Serikat. Keduanya secara ideologis dan kepentingan pragmatisnya telah membagi blok yang dipaksakan agar negara-negara yang memperoleh kemerdekaan dalam kurun ini untuk memilih satu

---

<sup>10</sup> Adrian B. Lopian, *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm.1.

di antara kedua bloknya. Bahkan ada ungkapan siapa yang tidak memilih masuk ke dalam bloknya akan dianggap sebagai musuhnya. Sejarah mencatat periode ini dikenal sebagai masa Perang Dingin yang berakhir pada hancurnya Uni Soviet pada 1989.

Menanggapi konstelasi kekuatan negara adidaya ketika itu, dengan kreativitas tinggi yang mendasarkan pada amanat pembukaan UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah “untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dengan landasan ini Mohammad Hatta, yang ketika itu sebagai Perdana Menteri, pada tahun 1948 menulis buku kecil “Mendayung di antara Dua Karang”.

Tulisan Hatta itu adalah untuk merespon dinamika kekuatan yang berkontestasi memperebutkan pengaruhnya terhadap negara-negara yang baru merdeka. Betapa beratnya untuk dapat dengan selamat ke pantai tujuan yakni suatu kehidupan dunia yang aman dan damai, bagi bangsa Indonesia sudah merupakan sejarah yang telah dilaluinya. Sebagai pelajaran maka inilah sumbangan Indonesia terhadap upaya yang hingga kini menjadi dambaan semua bangsa untuk menciptakan dunia yang aman dan damai.

Perkembangan dunia dalam dekade pertama milenium ketiga, memasuki abad ke-21, memperlihatkan pergeseran kekuatan dunia ke kawasan Asia. Perekonomian Eropa terpuruk dan Asia mulai bangkit. Empat negara Asia yang terus memperlihatkan kekuatan ekonomi yakni Cina, Jepang, Vietnam, dan India. Adalah suatu kecenderungan yang normal manakala perekonomian suatu negara kuat maka akan disusul oleh kemampuannya unjuk kekuatan militer.

Mundurinya Amerika Serikat dari Irak dan kemudian menggeser kekuatannya ke Asia Pasifik. Hal itu tidak sulit diterka oleh karena semakin terlihat intensitas manuver armada laut Cina di wilayah ini. Bahkan dengan pamer kekuatan armada lautnya, Cina mengakui Laut Cina Selatan. Provokasi ini telah mendorong munculnya isu konflik yang melibatkan negara-negara *claimant* lainnya: Vietnam, Filipina, Thailand, dan Malaysia. Meskipun Indonesia bukan negara *claimant*, tetapi akibat dari ketegangan itu dan tidak tertutup kemungkinan perang terbuka di Laut Cina Selatan akan menumpahkan dampak (*spill over*) yang mengancam kepentingan nasional kita.

Dari perspektif geo-historis, lingkungan strategis yang terus berubah baik yang bergerak lambat atau cepat sesungguhnya merupakan suatu keniscayaan bagi sebuah negeri bernama Indonesia. Dinamika itu akan terus terjadi justru karena letaknya yang strategis sejak dahulu, terutama Selat Malaka. Begitulah sesumbar orang Portugis setelah berhasil menguasai Malaka pada 1511, seperti diungkapkan Tome Pires:

“Barang siapa menguasai Malaka bisa mencekik Venesia. Sejauh Malaka, dan dari Maluku ke Cina dari Cina ke Maluku, dan dari Maluku ke Jawa, dan dari Jawa ke Malaka dan Sumatra, semuanya sudah berada dalam kekuasaan kami”.<sup>11</sup>

Masalahnya adalah sejauhmana kemampuan bangsa Indonesia di dalam menjaga kedaulatan negaranya di tengah lingkungan strategis yang berubah dengan cepat. Dalam konteks ini tentu kita berbicara mengenai sistem pertahanan negara, yang mampu dijabarkan ke dalam penyelenggaraan pertahanan.

Tidak untuk menggampangkan perkembangan kehidupan manusia di muka bumi, sesungguhnya ‘tidak ada yang baru di bawah matahari’ (*there is nothing new under the sun*). Begitulah dengan lingkungan dunia yang berubah cepat, pada hakikatnya dapat diantisipasi melalui kecenderungan-kecenderungan dan melalui pola-pola yang dapat diamati. Modal dasar bagi perumusan konsep itu adalah geo-sejarah. Dengan pendekatan geo-sejarah, kita dapat mengamati gejala atau kecenderungan posisi Indonesia dalam geostrategik yang sekaligus satu-satunya negara kepulauan di dunia.

Bangsa Indonesia adalah sedikit dari bangsa yang selepas Perang Dunia Kedua, dalam memperoleh kemerdekaannya yang diperjuangkan lama dan penuh pengorbanan. Kalau bahasa hiperbola boleh digunakan, ini merupakan kemerdekaan yang direbut dengan “jiwa dan raga” serta “darah dan air mata”. Dapat dikatakan karakter bangsa Indonesia adalah bela negara yakni suatu sikap cinta tanah air, memiliki rasa kebangsaan yang dengan nilai persatuan itulah kemudian mampu membebaskan diri dari penindasan dan penjajahan. Makna perjuangan seperti ini sayangnya belum dimaksimalkan untuk ditransformasikan ke dalam bentuk-bentuk baru perjuangan untuk membangun masyarakat yang adil, maju, damai dan sejahtera.

---

<sup>11</sup> Adrian B. Lopian, *op.cit.*, hlm. 5.

Nilai-nilai sejarah yang seperti itulah yang hendak diajarkan kepada anak didik dan meresap sebagai kekuatan yang membentuk ranah afektif sehingga akhirnya mewujudkan ke dalam sikap bela negara.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) periode 2009-2014 melalui Tim Kerja Sosialisasi telah merumuskan “Empat Pilar” Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pemilihan “empat pilar” tersebut adalah untuk mengingatkan kembali kepada seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terus dijalankan dengan tetap mengacu kepada tujuan negara yang dicita-citakan, serta bersatupadu mengisi pembangunan.<sup>12</sup> Agar empat pilar tersebut lebih mudah dipahami dan sebagai acuan bertindak maka kiranya perlu dikuatkan dengan pemahaman dan kesadaran kolektif mengenai sejarah perjuangan bangsa.

Menurut Prof. Hasjim Djalal, Indonesia sebagai negara yang berdaulat atas wilayahnya, dirajut oleh tiga peristiwa monumental yakni: Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Deklarasi Juanda 1957.<sup>13</sup>

### **Sumpah Pemuda 1928: Komitmen Dasar**

Suatu tonggak monumental di dalam sejarah bangsa Indonesia adalah Sumpah Pemuda, yang merupakan hasil dari Sidang Kedua Rapat para pemuda di Batavia, pada 28 Oktober 1928. Para pemuda yang berasal dari berbagai daerah berikrar sebagaimana yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda: Bertanah Air Satu—Tanah Air Indonesia, Berbangsa Satu—bangsa Indonesia, dan Menjunjung Tinggi Bahasa Persatuan—Bahasa Indonesia.

Lahirnya Sumpah Pemuda merupakan tahap pencapaian luar biasa bermakna mengingat sangat tidak mudahnya “mempersatukan” bangsa yang berasal dari berbagai etnik, yang pada dasarnya merupakan ‘bangsa’ (*nation*) sendiri. Namun faktor pendorongnya dapat ditemukan di dalam pengalaman penjajahan yang dirasakan bersama di hampir seluruh bumi Nusantara. Jadi faktor utamanya adalah sejarah.

---

<sup>12</sup> Sekretaris Jenderal MPR RI, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI, 2012), hlm.iv.

<sup>13</sup> Hasjim Djalal, “Deklarasi Djuanda Dalam Perspektif Sejarah”, dalam *Setengah Abad Deklarasi Djuanda: Sejarah Kewilayahan Indonesia*, (Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2007), hlm. 2-21.

Prof. Sartono Kartodirdjo (alm) dari Universitas Gadjah Mada pernah mengatakan :  
“kalau saja ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928 boleh ditambahkan satu lagi, maka ikrar yang keempat berbunyi “menjunjung sejarah persatuan—sejarah Indonesia” (bandingkan dengan ikrar yang ketiga “menjunjung bahasa persatuan—bahasa Indonesia”).

Tidak sulit untuk menerima pendapat di atas, apabila kita membaca ungkapan setelah ketiga ikrar Sumpah Pemuda. Sayangnya, bagian ini tidak menjadi bagian naskah Sumpah Pemuda yang kita baca. Perhatikan kalimat yang dimaksud: “Setelah mendengar putusan ini kerapatan mengeluarkan keyakinan azas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya: Kemauan, Sejarah, Bahasa, Hukum Adat, Pendidikan dan Kepanduan dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan”.<sup>14</sup>

Hal yang patut dicatat dalam kaitan tentang semakin terbaikannya mata pelajaran di sekolah dasar dan menengah adalah berkurangnya jam mata pelajaran tersebut. Terdegradasinya pelajaran sejarah adalah dengan dimasukkan ke dalam Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), yang diajarkan bersama dengan geografi, sosiologi, dan ekonomi untuk pendidikan dasar 9 tahun. Sedangkan di tingkat menengah atas, untuk kelas terakhir Ilmu pengetahuan Alam (IPA) nyaris tidak diberikan, sebab pada akhirnya hanya diberikan satu jam saja.

Bandingkan dengan pandangan Hasan Tiro, tokoh utama Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang yakin betul betapa pentingnya peranan sejarah dalam membangun nasionalisme dan dalam membentuk kehidupan bernegara. Di dalam berbagai kesempatan berbicara di depan masyarakat Aceh pada tahun 1976, ia selalu memompakan semangat di kalangan orang Aceh dalam memperjuangkan Aceh Merdeka melalui kesadaran sejarah. Mirip dengan pandangan Sartono Kartodirdjo, pendapat Tiro

---

<sup>14</sup> Museum Sumpah Pemuda, *45 Tahun Sumpah Pemuda*, (Jakarta: Museum Sumpah Pemuda, 2006), hlm. 69.  
44 Jurnal Pertahanan Maret 2014, Volume 4, Nomor 1

tentang peran sejarah adalah sangat berguna bagi pembentukan bangsa dan negara. Ia beryakinan bahwa “satu sejarah untuk satu negara”.<sup>15</sup>

### **Proklamasi Kemerdekaan: Mewujudkan Negara yang Berdaulat**

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan tonggak penopang “ingatan kolektif” (*collective memory*) yang berfungsi mengikat semangat persatuan bangsa dan menyatukan seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Rote sebagai wilayah NKRI. Perjalanan panjang bangsa di kepulauan untuk membebaskan diri dari penjajahan telah berlangsung sejak abad-abad sebelumnya.

Proklamasi 17 Agustus 1945 dianggap sebagai awal revolusi atau disebut juga perang kemerdekaan. Mungkin saja revolusi Indonesia tidak setara dengan revolusi-revolusi di dunia seperti Prancis, Rusia, Cina, bahkan Vietnam. Dari beragam definisi tentang “revolusi” yang ada suatu peristiwa antara tahun 1945—1949 di Indonesia menurut Anthony Reid sudah betul dan banyak dapat menjelaskan gejala yang muncul. Dibanding dengan revolusi Vietnam, yang juga berawal dalam Agustus 1945, terdapat satu partai tunggal, tidak sebagaimana yang ada di Indonesia.

Dalam revolusi Indonesia, justru terjadi konflik antar kekuatan yang ideologinya berbeda yang membentuk barisan atau laskar perjuangannya sendiri. Ini membuat kerumitan tersendiri yang di alami oleh para pemimpin negara yang baru lahir. Di antara beberapa pilihan istilah mengenai revolusi sosial atau revolusi borjuis, Anthony Reid menamakan revolusi Indonesia sebagai “revolusi nasional”. Itu karena hasil dari perubahan dengan kekerasan itu baik dalam menghadapi Belanda dan konflik internal adalah sebuah “negara kesatuan”.<sup>16</sup>

Meskipun Indonesia sebagai istilah politik baru dipergunakan pada dekade kedua awal abad ke-20, tetapi akar-akar perjuangan untuk menuju pada Indonesia Merdeka telah berlangsung sejak abad ke-17. Ini tentu tidak untuk mengatakan bahwa penjajahan Indonesia selama 350 tahun. Interpretasi yang tepat untuk itu adalah bahwa dalam

---

<sup>15</sup> Anthony Reid, “Aceh dan Indonesia”, dalam *Menuju Sejarah Sumatra Antara Indonesia dan Dunia*, (Jakarta: Yayasan Buku Obor, 2010), hlm. 344.

<sup>16</sup> Anthony Reid, “Revolusi Sosial di Tiga Wilayah Sumatra”, dalam *Menuju Sejarah Sumatra Antara Indonesia dan Dunia*, (Jakarta: Yayasan Buku Obor, 2010), hlm. 322-3.

periode sepanjang ratusan tahun itulah penduduk di kepulauan Indonesia ini telah berjuang untuk membebaskan dari penindasan VOC/Belanda hingga masa pemerintahan penjajahan Hindia Belanda.

Dengan kata lain, begitu lamanya Belanda harus menaklukkan perlawanan rakyat Indonesia sehingga baru berhasil secara resmi dalam membentuk suatu wilayah jajahan Belanda bernama *Pax Neerlandica* pada dekade pertama abad ke-20. Fakta itupun masih harus diberi catatan bahwa perlawanan rakyat bercorak gerakan sosial masih terus berlangsung di berbagai daerah. Strategi perlawanan terhadap kolonialisme Belanda pada awal abad ke-20 beralih melalui organisasi-organisasi mula-mula bercorak budaya (Budi Utomo) kemudian banyak merambah bidang politik (Sarekat Islam, Partai Indis, Partai Nasional Indonesia, dan sebagainya).

Dengan tonggak Proklamasi ini, bukti bahwa terbentuknya bangsa Indonesia dengan perjuangan revolusioner dan bahkan dengan cara-cara radikal. Inilah sebuah bangsa –yang menurut sejarawan terkemuka berasal dari Australia, Anthony Reid—lahir dari rahim revolusi.<sup>17</sup>

### **Deklarasi Juanda 1957 : Penegas Wilayah Kedaulatan**

Suatu ingatan kolektif bangsa yang masih belum sepenuhnya disadari karena penting dan bermaknanya bagi kehidupan bernegara adalah peristiwa Deklarasi Juanda 1957. Makna peristiwa ini tentu saja tidak berdiri sendiri hanya sebagai tonggak, melainkan justru menjadi penggerak utama (*prime mover*) bagi terciptanya suatu cara pandang atas sebuah wilayah negara: Wawasan Nusantara. Sedikit kilas balik bahwa perjuangan bangsa belum selesai setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 dicanangkan dan dengan tercapainya “penyerahan kedaulatan” melalui revolusi dan perang kemerdekaan pada akhir 1949. Hasil Konferensi Meja Bundar (27 Desember 1949) bukan saja masih menyisakan persoalan tertundanya penyerahan Irian Barat tetapi juga belum konkritnya luas wilayah kedaulatan Indonesia. Adalah merupakan jalan panjang sehingga pada akhirnya Irian Barat (kini: Papua) kembali pangkuan Republik Indonesia pada tahun 1963.

---

<sup>17</sup> Ada dua bab dalam buku Anthony Reid yang menggambarkan sifat revolusioner kelahiran bangsa Indonesia dalam *To Nation by Revolution Indonesia in the 20<sup>th</sup> Century*, (Singapore: National University Press, 2011).

Tidak itu saja, dalam dimensi kelautan, problem mendasar bagi penegakkan wilayah kedaulatan Indonesia terkendala oleh ordonansi yang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda tahun 1939. Dalam *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* (TZMKO) itu dinyatakan bahwa antar pulau di wilayah Hindia Belanda dipisahkan oleh laut-laut pedalaman. Belanda memang melakukan kebijakan pemisahan antar pulau yang ada. Sudah sejak abad ke-19, dengan sengaja, terlihat dari penyebutan adanya wilayah “Jawa” dan “Luar Jawa” yang dengan jelas disebut sebagai *buitengewesten* (wilayah luar) yang dimaksud di luar Jawa.

Prof. Hasjim Djalal berpendapat bahwa Deklarasi Juanda adalah salah satu tonggak yang sarat makna dalam sejarah tegaknya Republik Indonesia, terutama bertambahnya luas laut. Pada saat Proklamasi kemerdekaan, Indonesia hanya memiliki luas laut 100.000 km persegi. Dengan dicanangkannya Deklarasi Juanda 1957, luas itu bertambah hingga menjadi 3 juta km persegi.<sup>18</sup> Implikasi dengan diakuinya Indonesia sebagai *archipelagic state* dalam UNCLOS 1982 adalah semakin bertambahnya luas teritorial kedaulatan NKRI menjadi 8 juta km persegi.<sup>19</sup> Namun pada sisi yang lain, berkonsekuensi pada tantangan baru bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan suatu wilayah kedaulatan meliputi daratan, lautan, dan udara yang begitu luas.

Berbicara mengenai wilayah kedaulatan sesungguhnya terdapat tiga hal yang sama pentingnya. Pertama, bukan hanya dengan menetapkan batas-batas wilayah dan kedua dengan menegaskannya melalui kaidah ilmiah dan dengan pemberian penanda secara teknis di lapangan, ketiga, adalah juga dengan cara “memberdayakan” wilayah yang menjadi kedaulatannya itu. Mengapa hal ini menjadi sangat penting untuk dicatat, karena belajar dari sejarah (*lesson learned*) kita dapat mau mengulangi lagi peristiwa lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan, pada tahun 2004. Kekuatan pada pihak Malaysia yang memenangkan persidangan dalam Mahkamah Internasional di Den Haag, karena negara jiran itu telah dan benar-benar “memberdayakan” kedua pulau tersebut. Pembuktian

---

<sup>18</sup> Hasjim Djalal, *75 Tahun Prof. Hasjim Djalal: Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim*, (Jakarta: Lembaga Laut Indonesia, 2010), hlm. 62.

<sup>19</sup> Hasjim Djalal, “Deklarasi Djuanda Dalam Perspektif Sejarah”, dalam *Setengah Abad Deklarasi Djuanda: Sejarah Kewilayahan Indonesia*, (Direktorat Geografi Sejarah, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2007), hlm.18.

secara *de facto* ternyata yang menentukan bukan pada argumentasi “penetapan” dan “penegasan” atas wilayah, khususnya yang sama-sama dilandasi oleh argumentasi kuat.

### **Doktrin Pertahanan Negara dan Penjabarannya**

Dengan kondisi geografi yang sedemikian terbuka, maka Indonesia dengan sadar memilih untuk lebih bersifat bertahan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI serta melindungi keselamatan bangsanya. Dengan memperhatikan hakikat, sumber, bentuk, spektrum, dan skala ancaman yang semakin kompleks dan dengan begitu luasnya wilayah, maka NKRI sangat sulit dapat dipertahankan hanya secara militer, maka suatu sistem pertahanan yang dianggap sesuai adalah dengan melibatkan seluruh komponen bangsa.

Doktrin pertahanan negara mengamanatkan perwujudan sistem pertahanan negara adalah bersifat semesta, baik pada masa damai maupun pada keadaan perang. Esensinya adalah bahwa dalam penyelenggaraan pertahanan negara, doktrin merupakan acuan bagi setiap penyelenggara pertahanan dalam mensinergikan pertahanan militer dan pertahanan nir-militer secara terpadu, terarah, dan berlanjut sebagai satu kesatuan pertahanan.<sup>20</sup>

Dalam perspektif historisnya, doktrin pertahanan Indonesia mengalami evolusi dari masa ke masa sejak awal kemerdekaan sampai masa Orde Baru (1998). Telaah yang dilakukan oleh Andi Wijayanto tampaklah bahwa karakter dasar doktrin pertahanan Indonesia adalah doktrin pertahanan semesta. Strategi utamanya memobilisasi seluruh sumber daya nasional, gelar, defensif aktif, gelar operasi terpadu, konsepsi pertahanan berlapis, gelar pertahanan teritorial, dan gelar perang gerilya. Dari pengalaman peran masa lalu itulah, konsep pertahanan banyak mengandalkan pertahanan darat. Suatu gagasan yang seharusnya dilakukan adalah bahwa strategi baru harus lahir dari telaah ulang yang relevan dengan masa kini.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Doktrin Pertahanan Negara*, (Jakarta: Dephan RI, 2007), hlm.4.

<sup>21</sup> Andi Wijayanto, “Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia, 1945—1998”, *Prisma*, “Meninjau Kembali Pertahanan Indonesia”, (Jakarta: LP3ES, 2010), Vol. 29, hlm.3.

Sebagaimana dengan landasan: idiil (Pancasila), konstitusional, yuridis, maka sejarah juga merupakan landasan bagi doktrin pertahanan negara. Sejarah yang dimaksud disini adalah mengenai perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan dari penjajah asing, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dalam rangka mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Sejarah perjuangan bangsa memancarkan nilai-nilai heroik, patriotik, nasionalisme yang khas dan unik yang merupakan modal bagi perjuangan selanjutnya. Sejarah pun telah membuktikan bahwa semangat tersebut dirajut oleh sikap dan perilaku nyata seperti antara lain sifat kegotongroyongan, sepenanggungan (solidaritas), keuletan, dan pantang menyerah.

Titik kulminasi perjuangan panjang bangsa Indonesia memang terjadi pada saat Proklamasi 1945 dan perang kemerdekaan empat tahun sesudahnya. Namun dalam pendekatan sosio-kultural jejaring interaksi antarpenduduk di kepulauan Nusantara, sesungguhnya sudah berlangsung jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Inilah masa sebagai disebut Anthony Reid “kurun niaga” paling tidak sejak abad ke-14, dengan jelas sekali adanya fakta berlangsungnya aktivitas pelayaran dan perdagangan. Dan jauh sebelum itu, terutama bagian bagian barat Nusantara, suatu entitas politik yang diintegrasikan ke dalam kerajaan Sriwijaya antara abad ke-6 hingga ke-11. Dilanjutkan oleh kerajaan gabungan berkarakter bahari dan agraris yakni Majapahit hingga akhir abad ke-14 yang meliputi Nusantara. Jika perspektif politik dapat digunakan untuk menginterpretasikan kedua kerajaan besar itu, maka Prof. Nazarudin Sjamsuddin mengajukan pendapatnya bahwa “Republik Indonesia yang pertama dan kedua” adalah kedua kerajaan besar tersebut. Sedangkan kini NKRI merupakan “Republik Ketiga”.<sup>22</sup>

Semangat dan nilai yang melandasi sistem yang dikenal pertahanan semesta (sishanta) berakar dari pengalaman masa perang kemerdekaan 1945-1949. Istilah semula dari sistem itu adalah Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanrata), sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (2) “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”.

---

<sup>22</sup> Nazarudin Sjamsuddin, *Integrasi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1989).

Bertolak dari rumusan tersebut kemudian dituangkan ke dalam UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 1 butir (2) “Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumberdaya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman”.

Rumusan yang lebih implementatif dituangkan ke dalam Doktrin Pertahanan Negara yang menjelaskan prinsip-prinsip dalam pengelolaan sistem dan penyelenggaraan Pertahanan negara. Sedangkan di dalam tataran strategis Doktrin itu berfungsi untuk mewujudkan sistem pertahanan yang bersifat semesta, baik pada masa damai atau keadaan perang. Inti strategi pertahanan adalah mensinergikan pertahanan militer dan pertahanan nir-militer secara terpadu, terarah, dan berlanjut sebagai satu kesatuan pertahanan. Adapun wujud strategi pertahanan negara yaitu pertahanan berlapis, dalam arti melibatkan seluruh warga negara, dengan TNI sebagai inti kekuatan untuk menghadapi ancaman militer dan dibantu oleh komponen cadangan dan komponen pendukung yang menyelenggarakan fungsi-fungsi diplomasi, politik, ekonomi, psikologi, teknologi dan informasi dan keselamatan umum.

Konsep “perang semesta”, meskipun tidak dapat disamakan dengan Perang Kemerdekaan Indonesia (1945-1949), tetapi bermakna dalam dengan kaitan semangat dan nilai yang telah diperlihatkan sebagai sinergitas kekuatan militer dan nirmiliter, yang melibatkan rakyat. Namun demikian pengertian rakyat tidak harus dalam arti yang dipersenjatai. Perbedaan mencolok pada perkembangan kini karena terdapat perang semesta ‘bentuk baru’ yakni dengan pendekatan ‘smart power’ dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perang dengan menggunakan cara-cara militer.<sup>23</sup> Konsep itu maknanya bukan berarti seolah-olah rakyat yang berperang secara langsung sebagai *human shield*, melainkan kesemestaan seluruh potensi nasional yang dikerahkan untuk kepentingan pertahanan. Jadi lebih bermakna pertahanan semesta (*total defence*).<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> JS Prabowo, *Pokok-Pokok Pemikiran Tentang Perang Semesta*, (Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian Nasional, 2009), hlm. 51.

<sup>24</sup> Sudrajat, “Wawasan Hankamneg: Misi dan Kewenangan TNI-POLRI”, dalam Indria Samego (ed), *Sistem Pertahanan-Kemampuan Negara Analisis dan Problem*, (Jakarta: The Habibie Center, 2001), hlm. 162.

Suatu perkembangan yang harus dicermati adalah bahwa peperangan di masa depan akan jauh lebih kompleks karena dipengaruhi oleh terjadinya *Revolution in Military Affairs* (RMA), yaitu suatu medan perang yang ditandai dengan elemen-elemen *precision strike, information warfare, dominating maneuvers, dan space warfare*.<sup>25</sup>

Perhatian terhadap revolusi militer awalnya dari tulisan sarjana Uni Soviet tahun 1970-an dan 1980-an melalui kajian-kajian yang membahas *Military Technology Revolution* (MTR). Kemudian dengan cepat pembahasannya lebih holistik dalam konsep RMA. Kajian itu terutama oleh Marshall N.V. Ogarkov yang menganalisis potensi semangat revolusioner dalam teknologi baru. Ogarkov dan rekan-rekannya percaya bahwa ide sejarah itu didorong oleh revolusi.<sup>26</sup>

Di dalam konteks penyelenggaraan pertahanan, kita bicarakan strategi diproyeksikan dalam tiga lapis: medan pertahanan penyanggah, medan pertahanan utama, dan daerah perlawanan. Lapis pertama merupakan lapis terdepan yakni medan pertahanan yang berada di luar zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan wilayah udara di atasnya; lapis kedua merupakan lapis inti dari medan pertahanan mulai dari ZEE sampai dengan laut territorial, dasar laut, daratan, serta wilayah udara di atasnya, yakni yang menjadi mandala perang. Lapis ketiga merupakan daerah-daerah perlawanan. Wilayah ini berada di luar mandala perang, termasuk wilayah perairan Nusantara dan wilayah udara di atasnya yang dibangun dan dipersiapkan sebagai daerah pangkal perlawanan untuk memelihara kesinambungan perlawanan.<sup>27</sup>

Peperangan masa depan bersifat asimetrik dan non-linear dengan tingkat kompleksitas tinggi, maka justru diperlukan semacam perang semesta ‘baru’, strategi gerilya akan digunakan, seluruh wilayah menjadi ruang peperangan, daya tahan bangsa seperti akan diuji kembali, seperti zaman perang kemerdekaan. Persoalannya adalah seberapa tangguh? dan bagaimana prediksi setelah pengertian konseptual terkait sistem pertahanan dipahami, maka penyelenggaraan pertahanan negara dirangkum ke dalam

---

<sup>25</sup> Agus Widjojo, “Wawasan Masa Depan Tentang Sistem Pertahanan Keamanan Negara”, dalam Indria Samego (ed), *Sistem Pertahanan Keamanan Negara Analisis Potensi dan Problem*, (Jakarta: The Habibie Center, 2001), hlm. 46.

<sup>26</sup> Steven Metz & James Kievit, “Strategy and The Revolution in Military Affairs: From Theory to Policy”, 27 Juni 1995, dalam <http://www.au.af.-mil/au/awc/awegate/ssi/stratma/pdf:11-53>.

<sup>27</sup> Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Doktrin Pertahanan Negara*, (Jakarta: Dephan RI, 2007), hlm. 52-53.

lingkup strategi. Dengan landasan doktrin yang menuntun strategi pertahanan negara dengan tiga cakupan pengertian: tujuan (*ends*) untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa; wahana (*means*) dengan pertahanan militer dan nirmiliter; cara (*ways*) bagaimana mempertahankan; yakni dengan strategis berlapis.

Dengan disadari bahwa kemampuan persenjataan militer kita tidak memadai untuk mengejar ketinggalan dari persenjataan negara lain, terutama soal anggaran yang sangat besar, dan oleh sebab itu setidaknya sampai pada tahun 2020, yang hendak kita capai adalah *Minimum Essential Forces* (MEF), maka diktum “man behind the gun” dan dukungan rakyat melandasi penyelenggaraan pertahanan. Dengan doktrin sistem pertahanan semesta, dasar konsepsinya adalah pelibatan semua komponen sesuai dengan peraturan perundangan. Dengan demikian, sebagai perwujudan dari amanat undang-undang dasar meskipun landasan undang-undangnya belum diterbitkan, sikap bela negara sudah dapat diselenggarakan misalnya melalui sistem pendidikan nasional.

### **Simpul-Simpul Kekuatan Bangsa dan Bela Negara**

Hanya sedikit bangsa yang berhasil memperoleh kemerdekaan dari penjajahan asing pasca Perang Dunia II, bukan dengan cara diberi, tetapi direbut, yakni Aljazair, Vietnam, dan Indonesia. Meskipun mungkin berbeda dalam skala dan intensitas perjuangan mengusir penjajah asing, “revolusi Indonesia” dapat dibandingkan dengan “revolusi Vietnam”.<sup>28</sup> Meskipun revolusi Indonesia tidak termasuk ke dalam teori revolusi di dunia, tetapi sebagai perubahan cepat dan penuh kekerasan, revolusi Indonesia memiliki keunikannya sendiri. Di awal kemerdekaan memang strategi berdiplomasi yang dipilih oleh pemerintah, tetapi nyatanya ditentukan juga oleh strategi bersenjata. Pendek kata telah terjadi sinergitas yang solid antara cara-cara berunding dan pertempuran senjata. Lebih daripada itu keterlibatan rakyat telah memberi karakter tersendiri, sehingga periode ini dapat dijadikan sumber motivasi dalam membangun kekuatan bangsa untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

---

<sup>28</sup> William H. Frederick, “Seperti Bersaudara: Revolusi Indonesia dan Vietnam: Sebuah Perspektif Perbandingan”, dalam *Denyut Nadi Revolusi Indonesia*, Panitia Konferensi Internasional, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 344-346.

Militansi dan konsistensi bangsa yang terus dihadapkan berbagai ancaman sekaligus tantangan selepas proklamasi kemerdekaan, diperlihatkan oleh sejarah bangsa untuk mengatasi gejolak dan pemberontakan dalam negeri dan tarik-menarik kepentingan kekuatan eksternal dalam masa sampai berakhirnya masa Perang Dingin (1989). Dalam konteks ini, Indonesia adalah bangsa yang telah banyak mendapat pengalaman menghadapi ancaman dari luar dan dari dalam negeri sendiri yang disebabkan oleh perbedaan ideologi dan kepentingan golongan dan daerah.

Betapapun canggihnya alat persenjataan yang dimiliki suatu negara dalam mempertahankan diri dan dalam menghadapi musuh, kekuatan sesungguhnya ada pada dukungan rakyatnya. Kekalahan Amerika Serikat di Vietnam bukan disebabkan oleh faktor kekuatan persenjataannya, melainkan ketika rakyat tidak lagi mendukungnya. Masih dalam ingatan kolektif sejarah dunia, bagaimana kejenuhan warga negara Amerika terhadap perang saat itu, yang diungkapkan oleh berbagai bentuk antara lain seni musik, yang memunculkan “Flower Generation” dan dengan slogan yang marak saat itu “Make Peace not War” di tahun 1960-an dan awal 1970-an.

Penarikan pasukan Amerika Serikat dari Irak dan Afganistan terbukti lagi-lagi bukan karena kekuatan militernya (*hard power*) Amerika Serikat, tetapi karena militansi rakyat di kedua negara yang menganggap campur tangan Amerika Serikat terlalu jauh sehingga dirasakan sebagai penjajah. Dengan bergerilya, perlawanan eksponen yang tidak menginginkan negaranya dijajah itu telah melelahkan daya tahan Amerika untuk melanjutkan perangnya di sana.

Inti kekuatan pertahanan suatu negara ada pada rakyatnya. Dengan kata lain dapat pula dikatakan bahwa pusat kekuatan (*center of gravity*) di hati sanubari rakyat sebuah negara. Jadi dasarnya adalah semangat yang menggelora pada setiap dada seorang warga negara yang dengan cara apapun mereka pertahanankan ketika kedaulatan negaranya terancam.

Bagi TNI titik pusat kekuatan strategis menurut Brigadir Jenderal Junias L. Tobing adalah pada kemampuan mengikat sistem bersama, yaitu yang berdasarkan pada (1) persatuan dan kesatuan bangsa; (2) pemerintahan yang demokratik, dan (3) kepemimpinan yang kuat. Sedangkan pusat kekuatan itu berada pada tiga strata yakni (1)

pada bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (2) pada strata strategis TNI yakni semangat pengabdian TNI, dan (3) strata taktik bertempur.<sup>29</sup>

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, kita dapat tunjukkan bahwa ketika Yogyakarta, sebagai pusat pemerintahan diduduki dan pemimpin negara ditangkap dan dibuang ke Bangka pada aksi militer kedua 1948, rakyat bersama TNI di bawah komando gerilya Jenderal Sudirman, Belanda tidak berhasil mem-*fait accompli* negara Indonesia sudah hancur. Rupanya Belanda tidak menyadari ternyata masih ada satu *center of gravity* lagi yang belum ditundukkan yakni Jenderal Sudirman, pemimpin gerilya, yang *nota bene*, personifikasi terakhir bentuk perlawanan rakyat bersama TNI terhadap Belanda.

Jalannya sejarah Indonesia mungkin akan lain jika saat itu, Panglima Sudirman juga ikut menyerah. Atau pertanyaannya adalah bagaimana nasib negara Indonesia jika Sudirman menyerah? Dalam sejarah memang tidak ada istilah jika. Namun yang jelas, sebagai fakta bahwa Sudirman tetap berjuang dalam kondisi kesehatan sangat merosot dan dengan prinsip apa yang dipilihnya dengan mengatakan “saya tidak kecewa, dan rela mati bagi negeri yang kelak merdeka, adil, makmur dan sentosa”.<sup>30</sup>

Kisah-kisah heroik dalam mempertahankan kemerdekaan tidak hanya berlangsung di darat. Salah satu strategi Belanda adalah dengan memblokade laut dengan menguasai pelabuhan. Dengan blokade seperti ini, republik yang berpusat di Jawa akan mengalami kekurangan logistik bagi keperluan hidup dan persenjataan. Kisah heroik di laut yang dilakukan John Lie dan kawan-kawan penting dicatat dalam konteks perjuangan melawan penjajahan kembali Belanda. Kuatnya blokade laut Belanda dapat ditembus John Lie dalam upayanya memperoleh senjata di Singapura untuk keperluan perlengkapan perang kemerdekaan.<sup>31</sup>

Sementara itu suatu serbuan Angkatan Udara RI dalam perang kemerdekaan Pertama (1947) dapat dikemukakan dalam kaitan peristiwa pemboman terhadap tiga

---

<sup>29</sup> Junias L. Tobing, “Struktur Trata Pusat Kekuatan TNI dan Strategi TNI dalam Membangun Pusat Kekuatan TNI”, makalah Seminar Pusat Kekuatan Strategik (Strategic Center of Gravity) Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Mabes TNI Cilangkap, 2 November 2011.

<sup>30</sup> Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI, *Soedirman: Patriotisme, Gerilya dan Martabat Bangsa*, (Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI, 2008), hlm. 62-63.

<sup>31</sup> M. Nursam, *Memenuhi Panggilan Ibu Pertiwi, Biografi Laksamana Muda John Lie*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2008), hlm. 193-195.

kota: Semarang, Salatiga dan Ambarawa pada 29 Juli 1947. Sebagai aksi balasan dari Belanda, pesawat Dakota VT-CLA yang membawa bantuan obat-obatan dari Palang merah Internasional untuk Palang Merah Indonesia ditembak pesawat pemburu Belanda pada saat pesawat tersebut akan mendarat di Maguwo, Yogyakarta. Pesawat itu jatuh terbakar. Dua tokoh AURI Komodor udara Prof. Dr. Abdurrahman Saleh dan Komodor Agustinus Adisucipto gugur dalam peristiwa tersebut.<sup>32</sup>

Semakin kompleksnya dimensi ancaman yang telah bergeser ke ranah non-militer dan ketika peperangan telah masuk ke generasi keempat, maka mengalahkan musuh adalah dengan merebut hati dan pikirannya melalui media massa dan ini merupakan dimensi budaya. Ketika menjadi moderator Seminar Pusat Kekuatan Strategik Tentara Nasional Indonesia (TNI) 2 November 2011, budayawan Slamet Rahardjo mengemukakan pendapatnya yang menarik dicatat bahwa bentuk ancaman Amerika Serikat masa kini bukan lagi moncong senjata yang digunakan untuk menaklukkan musuh, tetapi diganti dengan pemutaran film di teater-teater atau bioskop yang kita tonton. Pun dapat dikatakan bahwa seni musik yang teatrikal dengan konsep “Korean Pop” sesungguhnya bentuk baru peperangan generasi keempat.

Kita bukan tidak memiliki kemampuan seperti itu, bakat dan potensi yang dimiliki anak-anak muda kita penuh kreativitas yang sudah tentu harus didukung oleh kebijakan yang positif. Dalam bidang film, tampaknya industri film kita masih minim sekali untuk memproduksi kisah-kisah perjuangan yang memperlihatkan sikap bela negara. Memang bukan tidak ada film-film bagus yang akhir-akhir diproduksi dengan tujuan membangkitkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Film “Tanah Surga ...Katanya” dengan pesan kuat “jangan sampai (kita) kehilangan cinta kepada negeri ini”. Sebelumnya ada film “Di Timur Matahari” yang merupakan film yang menunjukkan bahwa Papua adalah bagian Indonesia.

Kita memiliki kisah-kisah heroik dan patriotik yang benar-benar didukung oleh fakta sejarah perjuangan bangsa. Kisah-kisah yang dapat diangkat ke layar lebar maupun sinetron (layar kaca) banyak ditemui di hampir bagian di seluruh kepulauan. Selain itu situs-situs yang menjadi saksi bisu sejarah pembuangan tokoh-pejuang bangsa dapat

---

<sup>32</sup> Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI, *Sejarah TNI Jilid I (1945—1949)*, (Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000), hlm. 145.

dihidupkan melalui program lawatan sejarah. Itu adalah kegiatan mengunjungi situs-situs sejarah di seluruh kepulauan, yang merupakan orientasi nilai perjuangan bangsa.

Dukungan positif dari Wakil Presiden Boediono untuk memugar rumah pengasingan Bung Karno di Ende merupakan langkah konkrit yang kiranya perlu dilanjutkan. Adalah penting artinya agar semua pihak melakukan pelestarian situs-situs sejarah semacam itu yang berfungsi sebagai simpul-simpul perekat Nusantara. Pemugaran dalam arti merawat dan melengkapi koleksi memorabilia tentang peristiwa besar maknanya bagi upaya untuk merekam perjalanan perjuangan bangsa.

Di Papua kita segera diingatkan pada sebuah tempat yang sangat terkenal dalam sejarah perjuangan pergerakan nasional yakni Boven Digul. Disanalah aktivis pergerakan antara lain Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir diasingkan. Hatta dibawa untuk diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda ke Boven Digul dari pelabuhan Tanjung Priok pada bulan Januari 1935. Sedangkan Syahrir pada 7 Maret tahun yang sama. Di awal tahun 1936, kedua tokoh nasional tersebut dipindahkan ke Banda Neira hingga menjelang datangnya tentara Jepang.<sup>33</sup>

Selain itu, Papua dalam konteks sejarah pengasingan pejuang bangsa, nama Serui tidak akan pernah lepas dari ingatan kolektif perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? itu karena Serui merupakan pembuangan Sam Ratulangi, tokoh pergerakan nasional dan gubernur pertama Sulawesi, bersama dengan enam orang lainnya yakni Pondag, Daeng Ponto, Daeng Malewa, Tobing, Suwarno, dan Latumahina. Pada akhir tahun 1946, mereka diangkut dengan kapal laut menuju Serui dan baru dibebaskan pada tahun 1949. Mereka inilah yang menginspirasi Silas Papare dan Frans Kasiepo membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Mereka disebut oleh penduduk setempat sebagai “Bapak Merdeka”.<sup>34</sup>

Fakta di dalam sejarah tidak cukup hanya untuk dihapal, melainkan perlu diinterpretasi dan dimaknai. Seperti yang dipaparkan sekilas tentang situs-situs sejarah di atas, pada prinsipnya bermakna keindonesiaan. Itu karena keberadaannya merupakan

---

<sup>33</sup> Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, *Tempat Pengasingan dan Makam Pejuang Bangsa: Simpul-simpul Perekat Keindonesiaan*, (Jakarta: Asisten Deputi Sejarah Nasional, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2003), hlm. 38 dan 91.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 87-90.

simpul-simpul yang berperan merajut Nusantara juga. Para pejuang itu ternyata tidak merasa diasingkan, tetapi justru dapat menumbuhkan inspirasi bagi tumbuhkembangnya nasionalisme dan tujuan Indonesia merdeka. Melalui pemahaman dan kesadaran yang diharapkan dapat dipetik dari lawatan sejarah itu, maka sesungguhnya merupakan modal yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta sejarah perjuangan bangsa. Pada tahap ini sesungguhnya suatu penanaman nilai-nilai untuk menumbuhkan sikap Bela Negara sudah dapat dilakukan.

### **Kesimpulan**

Untuk memahami siapa diri kita sebagai bangsa, pertama-tama tentulah dilandaskan pada bagian bumi mana kita berpijak. Ngugi Thiong 'O, penyair dunia terkemuka dari Kenya pernah mengatakan bahwa persoalan mendasar suatu bangsa di dalam memandang dunianya – yang berarti juga masalah yang dihadapinya – adalah berangkat dari pertanyaan “*the question is this: from what base do we look at the world*”.

Basis dari mana kita memandang dunia adalah sebuah negeri dengan ciri kepulauan dan sudah menyatakan sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) yang besar dan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Dihadapkan pada ancaman yang berasal baik dari luar dan dalam negeri, maka kedaulatan wilayah NKRI yang harus dijaga dan dipertahankan tentunya dengan doktrin pertahanan yang relevan dengan kondisi itu.

Dalam perspektif historis, setiap zaman melahirkan semangatnya sendiri apa yang disebut oleh orang Jerman sebagai *Zeitgeist*. Dengan kata lain, setiap era memperlihatkan karakteristiknya masing-masing. Kini di era abad ke-21, pergeseran kekuatan dunia begitu cepat, yang pada dasarnya tidak lain karena masing-masing kekuatan hendak menguasai sumber daya bagi keberlanjutan kehidupannya. Sebagian besar sumber daya itu berada di Tanah Air kita. Ketika pergeseran kekuatan-kekuatan dunia ke Asia Pasifik maka keberadaan Indonesia menuntut segenap komponen bangsa mempersiapkan diri secara terus menerus terhadap ancaman yang pada dasarnya mengepung kita.

Dimana letak kekuatan kita adalah pertanyaan yang memerlukan doktrin pertahanan beserta penjabarannya yang mampu menjawab terhadap kompleksitas

ancaman baik dari dari luar dan dalam negeri. Dalam perspektif geo-historis dan pendekatan sejarah politik, maka potensi kekuatan bangsa ada pada nilai-nilai cinta tanah air dan kebangsaan, yang dapat disebut sebagai simpul-simpul perekat keindonesiaan. Fakta dalam sejarah itu patut dirawat dengan cara terus menerus melakukan reinterpretasi sehingga sesuai dengan tuntutan zaman.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Djalal, Hasjim. 2010. *75 Tahun Prof. Hasjim Djalal: Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim*. Jakarta: Lembaga Laut Indonesia.
- , 2007. "Deklarasi Djuanda Dalam Perspektif Sejarah", dalam *Setengah Abad Deklarasi Djuanda: Sejarah Kewilayahan Indonesia*. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia. 2007. *Doktrin Pertahanan Negara*. Jakarta: Dephan RI.
- Ditjend Strahan Kemhan. 2011. *Kebijakan Cina Terhadap Konflik Laut Cina Selatan*. Jakarta: Kemhan.
- , 2011. *Kehadiran Militer Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik: Implikasi Bagi Pertahanan Negara Indonesia*. Jakarta: Kemhan.
- , 2011. *Implikasi Dibukanya ALKI Barat-Timur dari Perspektif Pertahanan*. Jakarta: Kemhan.
- , 2011. *Analisa Ancaman Non-Tradisional: Implikasi Kejahatan Transnasional Terhadap Kepentingan Pertahanan Negara*. Jakarta: Kemhan.
- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI. 2008. *Soedirman: Patriotisme, Gerilya dan Martabat Bangsa*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI.
- , 2000. *Sejarah TNI Jilid I (1945—1949)*. Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi TNI.
- Frederick, William H. 1997. "Seperti Bersaudara: Revolusi Indonesia dan Vietnam: Sebuah Perspektif Perbandingan", dalam *Denyut Nadi Revolusi Indonesia*, Panitia Konferensi Internasional. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI. 2003. *Tempat Pengasingan dan Makam Pejuang Bangsa: Simpul-simpul Perekat Keindonesiaan*. Jakarta: Asisten Deputi Sejarah Nasional, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Lapian, Adrian B. 2008. *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Museum Sumpah Pemuda. 2006. *45 Tahun Sumpah Pemuda*. Jakarta: Museum Sumpah Pemuda.
- Nursam, M. 2008. *Memenuhi Panggilan Ibu Pertiwi, Biografi Laksamana Muda John Lie*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2008.
- Prabowo, JS. 2009. *Pokok-Pokok Pemikiran Tentang Perang Semesta*. Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian Nasional.

- P.S. Das. 2010. "India's Maritime Security Concerns and Responses", dalam K.V. Kesavan & Daljit Singh (eds.). *South and Southeast Asia Responding to Changing Geo-Political and Security Challenges*. New Delhi: Knowledge World Publishers Pvt Ltd.
- Reid. Anthony. 2011. *To Nation by Revolution Indonesia in the 20<sup>th</sup> Century*. Singapore: National University Press.
- , 2010. "Aceh dan Indonesia", dalam *Menuju Sejarah Sumatra Antara Indonesia dan Dunia*. Jakarta: Yayasan Buku Obor.
- , 2010. "Revolusi Sosial di Tiga Wilayah Sumatra", dalam *Menuju Sejarah Sumatra Antara Indonesia dan Dunia*. Jakarta: Yayasan Buku Obor.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1995. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sekretaris Jenderal MPR RI. 2012. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI.
- Sjamsuddin, Nazarudin. 1989. *Integrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Sudrajat. 2001. "Wawasan Hankamneg: Misi dan Kewenangan TNI-POLRI", dalam Indria Samego (ed). *Sistem Pertahanan-Keamanan Negara Analisis dan Problem*. Jakarta: The Habibie Center.
- Widjojo, Agus. 2001. "Wawasan Masa Depan Tentang Sistem Pertahanan Keamanan Negara", dalam Indria Samego (ed). *Sistem Pertahanan Keamanan Negara Analisis Potensi dan Problem*. Jakarta: The Habibie Center.

## Jurnal

- Wijayanto, Andi. 2010. "Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia, 1945—1998". *Prisma*, "Meninjau Kembali Pertahanan Indonesia". Jakarta: LP3ES. Vol. 29.

## Makalah

- Tobing, Junias L. 2011. "Struktur Trata Pusat Kekuatan TNI dan Strategi TNI dalam Membangun Pusat Kekuatan TNI", makalah Seminar Pusat Kekuatan Strategik (Strategic Center of Gravity) Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Mabes TNI Cilangkap, 2 November 2011.

## Website

- Metz, Steven & James Kievit, "Strategy and The Revolution in Military Affairs: From Theory to Policy", 27 Juni 1995, dalam <http://www.au.af.mil/au/awc/awegate/ssi/stratma/pdf:11-53>.

